

STRATEGI PEMERINTAH MEMBANTU PEKERJA MIGRAN DALAM MENGATASI DAMPAK COVID-19 DI SURALAGA, LOMBOK TIMUR

GOVERNMENT STRATEGY TO ASSIST MIGRANT WORKERS IN OVERCOMING THE IMPACT OF COVID-19 IN SURALAGA, EAST LOMBOK

Saipul Hamdi¹, Syarifuddin², Oryza Pneumatica Indrasari³, Ega Erlina⁴
¹²³⁴Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.63, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
shamdi@unram.ac.id

Diserahkan : 04/09/2022; Diperbaiki : 21/09/2022; Disetujui: 7/11/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i2.289

Abstrak

Akibat pandemi Covid-19, kondisi keberlangsungan ekonomi keluarga migran yang bergantung pada pengiriman remitansi saat ini sangat rentan, khususnya migran yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini diperparah ketika pekerja migran memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan memperburuk situasi keuangan rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran Indonesia tidak maksimal dalam mengelola remitansi pada hal-hal yang bersifat produktif. Melihat kondisi sosial-ekonomi pekerja migran tersebut maka artikel ini juga berupaya untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak sosial ekonomi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dalam pengambilan data di lapangan. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki strategi untuk dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi, seperti memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah desa juga memberikan perhatian khusus kepada PMI dengan bantuan seperti BLT, BST, dan pelatihan UMKM.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Sosial-Ekonomi, Pandemi Covid-19, Suralaga

Abstract

The economic viability of migrant families who depend on remittances is currently very fragile due to the Covid-19 pandemic, mainly migrants who provide for their families. When migrant workers have a lot of dependents, it makes the household's financial status worse and makes this predicament worse. The management of remittances on productive matters is also subpar in the families of Indonesian migrant workers. This article examines the socioeconomic circumstances of migrant workers to learn how Indonesian migrant workers overcame the financial crisis brought on by the Covid-19 outbreak. This article also intends to look into local government initiatives to support employees in resolving these socioeconomic repercussions and the socioeconomic impacts on migrant workers. The study was carried out over six months (January–June 2022) utilizing qualitative research approaches, including interviews, focus groups, FGDs, and data collection documentation in the field. In this study, 30 informants—15 men and 15 women—made up the sample. According to

the research findings, migrant workers have techniques for surviving during a pandemic, such as leveraging the agriculture and livestock sectors. Additionally, the local administration gives migrant workers special consideration by providing direct financial help, cash social assistance, and MSME training.

Keywords : *migrant workers, socio-economic, Covid-19 pandemic, Suralaga*

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 (Coronavirus Disease of 2019) mulai terdeteksi di Wuhan, China pada tahun 2019. Wabah itu dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO dan penyakit menular ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Hamdi, 2022; Verma & Prakash, 2020). Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Akibat dari penanganan pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat, banyak sektor industri mengalami kesulitan (Verma & Prakash, 2020). Pemerintah telah bekerja keras untuk menghindari penyebaran pandemi ini dengan menutup semua kegiatan yang melibatkan keramaian di luar rumah, dan mereka yang ingin berpergian dan ingin keluar rumah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, masyarakat harus mematuhi aturan 3M: pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak (Sarmigi, 2020; Sari, 2021).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia yang meluas pada kelompok-kelompok yang sangat rentan. Salah satu kelompok rentan yang terkena dampak pandemi global Covid-19 adalah pekerja migran Indonesia (Choudhari, 2020; Probosambodo & Widiastuti, 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia atau disingkat (PMI) mencakup setiap masyarakat negara Indonesia yg akan, sedang, atau sudah melakukan pekerjaan menggunakan mendapat upah pada luar daerah Republik Indonesia (Widiyahseno, et al. 2018).. PMI adalah grup rentan terhadap penularan penyakit ini terutama lantaran PMI bekerja pada luar negeri & mempunyai gerak tinggi. Jumlah PMI pada luar negeri waktu ini mencapai 7 juta orang lebih yg beredar pada 132 negara (World Bank, 2017; Widodo, & Belgradoputra, 2019).

Dampak lain yang dirasakan buruh migran Indonesia, terutama yang berada pada tahap persiapan keberangkatan, sebagian buruh migran tersebut harus menunda keberangkatannya akibat menguatnya kebijakan transportasi migran dan pembatasan penerbangan di banyak negara. Demikian pula, pekerja migran Indonesia yang telah memutuskan kontrak dan ingin kembali selama pandemi Covid-19 harus dikarantina sendiri setelah dideportasi ke negara asalnya (Rijal et al., 2020; Harjana et al., (2021)).

Banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia di setiap daerah tidak terlepas dari minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke daerah maupun negara tersebut. Biasanya faktor pendorong pekerja migran untuk bekerja ke Luar daerah maupun keluar negeri yaitu karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang kecil di Negara asal, sedangkan di Negara tujuan mereka mendapat income yang jauh lebih tinggi (Syaifullah, 2016; Liem et al., 2021)). Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB Tahun 2021, pekerja migran yang berasal dari Provinsi NTB didominasi oleh pekerja migran yang bekerja di Malaysia 3.186 sebanyak orang, Hongkong sebanyak 454 orang, dan Arab Saudi sebanyak 193 orang. Dilihat dari upah bekerja di Malaysia mencapai Rp.10 juta/bulan, sedangkan Hongkong mencapai Rp. 9,85 juta/bulan dan Arab Saudi mencapai Rp. 12 juta/bulan (Disnakertrans NTB, 2021) Sehingga, dengan upah pekerja migran Indonesia yang tinggi dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga yang berada di daerah asal melalui pengiriman remitansi.

Apabila kita lihat pada sektornya, pekerja migran yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB Tahun 2021 yang paling banyak berada di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah pekerja migran sebanyak 1.793 orang (Disnakertrans Ntb, 2021). Tapi di masa pandemi Covid-19 banyak dari pekerja migran Indonesia harus rela pulang kampung ke daerah asalnya karena dampak dari Covid-19 ini. Sebagian besar dari mereka harus dipulangkan karena dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 setelah di PHK, penganiayaan maupun habis masa kontrak di negara mereka bekerja. Bahkan beberapa di antara pekerja migran Indonesia banyak orang merasa sakit dan melarikan diri, dan gaji telah dikurangi dari 600 dollar menjadi 400 dollar karena ekonomi yang tidak stabil (Hajar, 2021; Disnakertrans NTB, 2021). Pengurangan gaji buruh migran mengurangi remitansi buruh migran Indonesia kepada keluarganya di daerah asalnya. Akibatnya, perekonomian keluarga migran juga terganggu sehingga sangat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama yang mengandalkan remitansi. Jika tanggung jawab banyak keluarga ada di tangan TKI, situasi ini akan diperparah dan semakin memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Tanpa disadari, keluarga imigran dapat terjerumus ke dalam lingkaran setan kemiskinan dan memiliki situasi kehidupan yang tidak stabil, sebuah peluang untuk menambah hutang keluarga mereka. Kecuali ditunjang dengan pendapatan yang layak, peningkatan utang keluarga ini terasa berat (Salmah, 2015; Syahrial, 2020; Sina, 2020).

Terlihat dari banyaknya dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, maka artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial-ekonomi pekerja migran akibat Covid-19, dan untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi, serta langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja migran dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Hal ini sangat perlu untuk digali lebih dalam tentang dampak yang mungkin dirasakan oleh pekerja migran karena dengan mengetahui dampak yang dialami maka pemerintah atau pekerja migran itu sendiri akan mencari solusi demi mengatasi maupun meminimalisir dampak yang telah ditimbulkan oleh pandemi ini.

Penelitian tentang dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 terhadap pekerja migran belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Mayoritas dari tulisan tentang pekerja migran terfokus pada isu tentang pengelolaan remitansi, kekerasan terhadap buruh migran (Hamdi, 2021), tidak adanya perlindungan hukum menyebabkan pekerja migran perempuan ke ruang gelap eksploitasi seksualitas (Larsen, 2010; Surtees, 2003: 102; Asriani & Amalia, 2014: 153). Adapun tulisan tentang dampak pandemi terhadap ekonomi buruh migran di antaranya adalah Rahmawati dan Kamilah (2020) menyatakan bahwa pekerja migran mengalami berbagai permasalahan selama pandemi, baik secara ekonomi, psikososial, hingga kesehatan, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan negara tempat PMI bekerja untuk mengatasi kendala tersebut. Inilah kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini sekaligus menutup gap atau kekurangan dari penelitian sebelumnya yang tidak memasukkan strategi-strategi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah untuk membantu pekerja migran keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, khususnya yang berada di Kecamatan Suralaga Lombok Timur.

Memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yakni tindakan rasionalitas instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional (Ekström, M. 1992; Schutz, 1976). Tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan rasionalitas instrumental yang terjadi di sini yaitu pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 ini, khususnya untuk kehidupan sosial pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan segala sesuatu dari rumah, dan kebijakan dalam kehidupan ekonomi seperti pemberhentian kerja dan pemulangan ke daerah asal. Selain memberikan kebijakan pemerintah juga

memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakatnya agar tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Tindakan yang rasional berlandaskan nilai, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut (lihat Ritzer, dan Gouglas2011).

Tindakan sosial berorientasi nilai yang terjadi di sini yaitu saat virus Covid-19 sudah berkurang dan dianggap sudah aman untuk melakukan kegiatan keagamaan shalat berjamaah di masjid tetapi masyarakat sudah terbiasa sehingga mereka tetap menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan sehingga masyarakat melakukan tindakan sesuai nilai yang sudah ada. Tindakan afektif yang terjadi di sini yaitu kondisi mental yang dialami oleh pekerja migran yang dipulangkan karena mereka dianggap sebagai pembawa dan penyebar virus. Hal ini sangat berdampak terhadap kesehatan mental pekerja migran yang membuat dia sakit, pusing, demam. Begitupun dengan keluarganya yang mendapatkan stigma dan diskriminasi di tempat tinggal. Tindakan tradisional, yaitu tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Tindakan tradisional yang terjadi di sini yaitu kebiasaan turun-temurun masyarakat Suralaga bekerja sebagai pekerja migran. Hal itu dilakukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan di tempat tinggal, dan masyarakat merasakan bahwa gaji sebagai pekerja migran sangat banyak sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, membeli rumah dan lahan dalam waktu yang cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisa data. Peneliti memilih pendekatan fenomenologi dalam menganalisa data yakni menekankan pada pengalaman informan selama masa pandemic (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Target dari Penelitian ini adalah untuk menemukan dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Suralaga Lombok Timur. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu subjek dipilih sesuai tujuan penelitian. Pemilihan subjek berdasarkan tujuan dilakukan agar meningkatkan kegunaan data yang didapatkan dari subyek yang kecil (Moleong, 2013). Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data di lapangan. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian yakni buruh migran, pegawai atau staf desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan yang berhubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap buruh migran. Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 30 informan yaitu 15 laki-laki dan 15 perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 Terhadap Perkembangan Sosial-Ekonomi Pekerja Migran Indonesia

Pada tahun 2019, wabah Covid-19 (Coronavirus Disease of 2019) mulai terdeteksi di Wuhan, China (Susilo, 2020; Verma, & Prakash, 2020). Wabah itu dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO dan pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020

(Telaumbanua, 2020;). Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya dari penyakit menular ini. Akibat dari pandemi, banyak sektor industri mengalami kesulitan (Sharifi, et al., 2021). Pemerintah telah bekerja keras untuk menghindari dampak pandemi ini dengan menutup semua kegiatan di luar rumah atau ruangan, dan mereka yang ingin berpergian dan ingin keluar rumah harus mematuhi peraturan 3M, yakni memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir (Sarmigi, 2020). Selain dari sektor kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak yang sangat besar di sektor sosial-ekonomi masyarakat, khususnya bagi pekerja migran di Indonesia. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa dampak Covid-19 terhadap perkembangan sosial-ekonomi buruh migran di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yaitu sebagai berikut:

Pemutusan hubungan kerja dan pemulangan ke daerah asal

Salah satu dampak pandemi Covid-19 terhadap sosial-ekonomi pekerja migran adalah akhir dari pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) (Hajar, 2021). PHK adalah kegiatan yang mengeksekusi semua organisasi untuk kepentingan melanjutkan bisnis. Pemecatan atau pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh kemampuan terbatas dari perusahaan untuk memenuhi keuntungan organisasi atau perusahaan. PHK sebenarnya hal yang sangat tidak diharapkan oleh semua pihak dalam perusahaan. Pemberhentian karyawan atau PHK adalah kehilangan pekerjaan yang nantinya akan berdampak hilangnya upah maupun gaji yang selama ini sebagai penghasilan bagi karyawan. Oleh sebab itu, karyawan tidak menginginkannya kecuali karena alasan tertentu atau pemecatan atas permintaan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan, pemecatan mengarah pada proses penerimaan sumber daya manusia baru yang berdampak memberikan biaya yang sangat besar kecuali atas pertimbangan operasional (Bangun, 2017). Hal tersebut menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan bagi pekerja migran yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 terhadap perkembangan sosial-ekonomi buruh migran yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja.

Adapun imbas dari pemutusan hubungan kerja atau PHK di daerah tempat buruh migran bekerja yaitu pemulangan buruh migran ke daerah asal mereka. Buruh migran harus rela pulang ke daerah asal mereka karena alasan pemutusan hubungan kerja tersebut. Hal ini merupakan dampak yang terberat bagi buruh migran karena mereka harus kembali ke kampung halaman mereka dan ini mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran khususnya di daerah mereka. Berdasarkan hasil penelitian, buruh migran di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang bekerja di luar daerah maupun di luar negeri mendapatkan PHK dan harus rela pulang ke kampung halaman mereka di Suralaga. Hal tersebut merupakan imbas dari pandemi Covid-19 disebabkan perusahaan tempat mereka bekerja yang harus memulangkan mereka karena pendapatan perusahaan mereka menurun drastis selama pandemi ini. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Zuririadi yaitu:

“Kemarin awal pandemic covid saya dipulangkan oleh majikan, karena sesuatu hal. Mau tidak mau saya terpaksa untuk pulang karena mungkin majikan saya ada ketakutan sendiri akibat Covid-19 ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya menggunakan uang yang saya tabung selama bekerja di rantauan” (wawancara 13 Maret 2022).

Pemotongan Gaji/Upah

Dengan adanya pandemi Covid-19, sebuah perusahaan diharuskan segera mengambil keputusan terbaik demi keberlangsungan perusahaan tersebut, dan banyak perusahaan-perusahaan mengambil keputusan untuk memotong gaji karyawannya (Anwar, 2020). Pemotongan gaji tersebut harus diterima oleh para pegawai di tengah merosotnya

pendapatan perusahaan tempat mereka bekerja demi menopang keuangan perusahaan agar tetap stabil. Menurut Ropidin dan Riyanto (2020), perusahaan melakukan efisiensi dengan memberlakukan pemotongan gaji guna mengurangi pengeluaran keuangan perusahaan agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, buruh migran di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menerima potongan gaji dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja. Hal tersebut merupakan imbas dari dampak yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan dari perusahaan tempat mereka bekerja selama pandemi ini. Perusahaan tempat pekerja migran bekerja harus mengambil keputusan tersebut demi menjaga keberlangsungan perusahaan tempat mereka bekerja sehingga mengurangi jumlah pengeluaran yang mereka keluarkan untuk menggaji para karyawan karena kurangnya pemasukan di masa pandemi ini. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Baiq Rohyati yakni :

“Pada awal pandemic covid-19 suami saya mengalami pemotongan gaji oleh perusahaan tempat dia bekerja dan itu mengakibatkan pengurangan jumlah kiriman dari biasanya ke saya di kampung halaman, mau bagaimana saya tetap terima karena itu sebagai dampak dari pandemic ini, yang terpenting suami saya sehat di Negara orang dan hasil kirimannya saya gunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan rumah dan menabung” (wawancara tanggal 15 Maret 2022).

Strategi Pekerja Migran Indonesia untuk Keluar Dari krisis Ekonomi Selama masa pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak selalu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun membawa dampak yang luas terutama di sektor sosial-ekonomi. Untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi di tengah pandemi ini, pekerja migran menerapkan beberapa strategi dengan memanfaatkan potensi desa yang ada untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi covid-19. Strategi tersebut antara lain:

Memanfaatkan Sektor Peternakan

Peternakan paling tidak mempunyai empat aspek strategis yaitu peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama protein hewani, peternakan sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, peternakan untuk pertanian berkelanjutan dan perbaikan lingkungan dan peternakan untuk bantuan komunitas ternak. Bagi para pekerja migran Indonesia yang terdampak oleh pandemi Covid-19, sektor peternakan merupakan pilihan yang bisa dijadikan alternatif dalam mengatasi krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan sektor peternakan, pekerja migran Indonesia bisa meraup pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan karena selain dijual hasil dari sektor peternakan juga bisa dikonsumsi langsung oleh para pekerja yang memanfaatkan sektor ini. Berdasarkan temuan penelitian, pekerja migran Indonesia di Kecamatan Suralaga (Desa Suralaga, Dasan Borok, Paok Lombok) yang mendapat pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan atau tempat mereka bekerja beralih profesi dengan memanfaatkan sektor peternakan. Banyak dari mereka beternak unggas seperti ayam dan bebek maupun burung-burung yang lain, selain unggas mereka juga beternak kambing, sapi, dan kerbau. Melalui sektor inilah para buruh tani mengatasi krisis yang mereka alami terutama krisis ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh mantan Kepala Desa H. Jalal:

“Selama ini kita lihat menganggur mereka gagal mengelola uangnya habis, pertama dia buat rumah, biaya sekolah kan habis uangnya. Tapi ada segelintir orang yang udah punya usaha, tapi setelah mereka pulang ndak ada pekerjaan disini menganggur mereka, kadang kadang petani tapi harga pupuk mahal

gimana bisa hidup petani, seharusnya kalian yang jadi dosen dan mahasiswa ini teriakkan nasib petani-petani ini. Terus terang pada saat ini memang situasi kita susah saya juga mengalami kerugian, anjlok sekali akibat pandemic ini harga telur murah pakan mahal jagung mahal. dulu dapat kita harga 300 sekarang sudah naik jadi 435 satu karung. Sekarang rata rata kita jadi peternak rugi telak kita. Saya punya 3 pegawai disini saya kasih mereka 2.5jt perbulan” (Wawancara H. Jalal tanggal 13 Maret 2022).

Memanfaatkan Sektor Pertanian

Selain dari pemanfaatan sektor peternakan, sektor lain yang bisa menjadi strategi untuk menangani krisis ekonomi yang dialami buruh migran selama masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memanfaatkan sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi. Sektor pertanian umumnya merupakan penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya sebagai makanan sehari-hari masyarakat, tetapi juga sebagai sumber devisa negara. Sektor pertanian masih menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja dari waktu ke waktu, karena sifat kegiatannya yang tradisional dan selalu membutuhkan produk-produk dari pertanian.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, buruh migran di desa Paok Lombok Melakukan strategi dengan memanfaatkan sektor pertanian demi mengatasi krisis yang mereka alami terutama krisis ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Setelah buruh mendapatkan PHK mereka akhirnya kembali ke daerah asal mereka dan berusaha memanfaatkan lahan yang berada di daerah mereka, yang sudah mereka beli selama menjadi pekerja migran, dengan menanam berbagai macam tanaman pangan seperti sayur, padi, jagung dan umbi-umbian. Tetapi mereka lebih dominan menanam sayur-sayuran. Hal ini merupakan strategi yang diterapkan oleh pekerja migran di Paok Lombok demi mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka setelah terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Lili Hariani dan H. Muhammadun yaitu :

” Kalau untuk harga labu bisa dibilang murah, tidak semua sih namun kenapa tidak kita bisa membantu untuk nilai tambah pada harga labu itu, kita beli labu seharga 10 ribu dan bisa kita olah kembali dengan harga mencapai 100 ribuan. Kalau petani jual di pasar dengan harga 10 ribu namun di umkm bisa dengan 15 ribu tanpa harus mengeluarkan ongkos kendaraan ke pasar untuk menjual dan kita disini saling membantu dengan para petani yang ada. Khusus untuk pemerintah banyak yang harus diperhatikan khususnya di dasan borok ini yaitu terkait dengan label dan surat izin produksi yang bisa mengurangi atau pemasaran produk. Kita disini saling membantu satu sama lain untuk dapat memanen dan menjual hasil sayuran. Ada juga bagian yang pergi menjual hasil panen ke pasar, kita semua saling percaya satu sama lain karena memang kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan di masa yang susah seperti ini. ” (wawancara H. Muhammadun tanggal 14 Maret).

“Menjadi saudagar sayur, dan itu merupakan penghasilan utama saya karena lepas tani fokus usaha jadi setiap hari ke pasar, penghasilan 1 hari itu bisa 1 juta, tergantung kadang ada yang sudah dipesan itu pasti ada keuntungan” (wawancara Lili Hariani tanggal 24 Maret 2022).

Berjualan di Pasar

Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, proses, hubungan sosial, dan infrastruktur bagi perusahaan untuk menjual barang, jasa, dan tenaga kerja kepada orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa dijual dengan menggunakan alat

pembayaran yang sah atau uang (Stanton, 1991). Pasar bermacam-macam dalam ukuran, ruang lingkup, ruang lingkup geografis, lokasi, jenis dan keragaman komunitas manusia, dan jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Fungsi pasar yaitu wadah kegiatan yang berasal dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik barter atau jual beli yang diwujudkan dalam bangunan. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, pekerja migran di Desa Paok Lombok melakukan strategi dengan berjualan di pasar. Sebagian pekerja migran melakukan strategi berjualan di pasar demi mencukupi kebutuhan hidup. Strategi ini membuat para buruh tani bisa meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Rosmawati yaitu :

“Saya menjual sebagian hasil kelapa saya ke pasar, karena jika dijual ke pabrik akan sangat sedikit untuk mendapat untung, karena di pabrik di lihat dari segi ukuran dan berat kelapa tersebut, yang tidak lolos seleksi akan dibuang jadi kita banyak ruginya, kita mau pergi ambil juga tidak mungkin karena malu, maka dari itu kami memutuskan untuk menjualnya di pasar”(wawancara tanggal 25 Maret 2022).

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Membantu Pekerja Migran Indonesia dalam Mengatasi Dampak Sosial-Ekonomi

Dalam menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, peran pemerintah dalam hal ini sangat penting adanya. Berbagai cara pemerintah khususnya pemerintah daerah di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dalam mengatasi masalah yang diakibatkan oleh dampak Covid-19 bagi buruh migran, yaitu sebagai berikut,

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai atau disebut BLT merupakan Program bantuan pemerintah berupa bantuan tunai atau berbagai bantuan lainnya, baik bantuan tunai bersyarat maupun bantuan tunai tanpa syarat kepada masyarakat miskin. Jenis BLT yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 adalah BLT Dana Desa. Dana Desa BLT merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid19. Kehadiran BLT Desa diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini, terutama 4.444 jiwa, tinggal di pedesaan. Ketika daya beli masyarakat tumbuh, mungkin sedikit banyak membantu membangun kembali ekonomi penduduk desa. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, pemerintah daerah di Desa Paok Lombok memberikan BLT Dana Desa kepada buruh migran yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Buruh migran yang mendapatkan dana ini yaitu buruh migran yang mendapatkan PHK dan pemulangan dari tempat mereka bekerja. Terkadang pemerintah daerah memberikan dana ini dengan memberikan berbagai macam sembako untuk menunjang kebutuhan sehari-hari para buruh migran di Desa Paok Lombok. Dengan bantuan langsung tunai ini, pemerintah sangat berharap perekonomian dari buruh migran bisa pulih di tengah pandemi Covid-19 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris desa Muhammad Kencana yaitu:

“Untuk saat ini kita memang agak kesulitan sejak penerapan regulasi tentang covid karena sangat mengikat. Jadi dimana di dalam, terutama dalam struktur penganggaran belanja desa sudah ditentukan semuanya dari pusat. Termasuk tahun ini 68% untuk covid ini. Itu untuk BLT, penanganan covid, dan ketahanan pangan, Itu sudah diatur oleh pusat, diprioritaskan di sana untuk PHK penambah

covid untuk yang jompo, tetapi yang tidak dapat bantuan BST, PKH, BPMT dari pemerintah itu yang di prioritaskan. Cuma karena regulasi yang dikeluarkan itu sangat mengikat. Missal kayak peraturan sekarang untuk BLT 40% dari jumlah dana desa. Jumlah dana desa tahun ini di desa Paok Lombok 1milyar 150 juta, itu 40% harus untuk BLT kurang lebih 460 juta untuk BLT saja” (wawancara tanggal 13 Maret).

Dari hasil wawancara di atas terdapat perbedaan dengan hasil wawancara eks pekerja migran di mana bantuan tersebut kebanyakan pekerja migran yang tidak mendapatkannya. Hal itu diduga karena pengumpulan data oleh staf desa tidak valid dan dana yang sedikit karena semua pihak terdampak oleh pandemi ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hasiyah :

“Tidak ada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah yang diterima di masa pandemi covid-19 seperti sembako, uang tunai, pkh dan lain sebagainya. Kita terima saja karena rezeki sudah diatur sama yang diatas, kalau rezeki tidak akan tertukar” (wawancara tanggal 7 Maret 2022).

Pelatihan UMKM

UMKM, atau singkatan usaha mikro/kecil, bukan lagi bahasa asing bagi masyarakat desa. Kemungkinannya masih besar dan kemungkinannya masih sangat luas, sehingga UMKM dipandang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup khususnya bagi masyarakat sekitar. Pemerintah pada masa pandemi ini melakukan berbagai pelatihan UMKM. Hal ini dirancang untuk membekali sumberdaya manusia, terutama eks pekerja migran yang mendapatkan PHK atau pemulangan dari tempat mereka bekerja. Pelatihan UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan proses manufaktur dan material. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, pemerintah daerah di Dasan Borok memberikan pelatihan bagi buruh migran yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Para eks pekerja migran diberikan latihan untuk mengembangkan usaha kecil seperti usaha pembuatan rengginang, kerupuk, dan juga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari pelatihan ini yaitu kewirausahaan sekaligus mengurangi jumlah pengangguran dan orang miskin dan juga memberikan pelatihan pengetahuan, motivasi dan keterampilan kepada masyarakat sekitar selain memberikan akomodasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Dasan Borok Angga Sarimah yaitu :

“Termasuk UMKM yang ada di Dasan Borok ini lebih mengelola sumber lokal yang ada, artinya bahan baku mereka ini bersumber dari pertanian, seperti ubi, labu dan ini di proses dan ada masyarakat yang punya beras ketan itu yang dibuat rengginang dan buat tape dan lain-lain. Dan itu akan dioptimalkan sehingga masyarakat yang berprofesi jadi petani mempunyai bahan baku, maka kelompok-kelompok UMKM inilah yang mengelola dan mengolah sehingga muncullah produk-produk olahan seperti, jajanan kering jajanan basah. Dana desa yang disalurkan pemerintah dari semua desa yang ada sebenarnya bagaimana bisa menghidupkan perekonomian yang ada” (wawancara tanggal 25 Maret 2022).

Pemberian Bibit Lele

Budidaya ikan lele merupakan kegiatan dimana masyarakat bisa memelihara atau membudidayakan maupun menjual ikan lele. Lele dapat dibudidayakan dengan relatif mudah di iklim hangat, sehingga menyediakan makanan untuk pasar lokal. Hal ini menjadikan pemerintah mengambil langkah untuk memberikan bibit lele kepada masyarakat, agar masyarakat bisa membudidayakan ikan lele sebagai alternatif masyarakat

dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, pemerintah daerah di Desa Dasan Borok memberikan bibit lele kepada masyarakat khususnya eks pekerja migran Indonesia agar mereka mengembangbiakan lele di daerah mereka. Langkah ini diambil oleh pemerintah agar lele yang dibudidayakan masyarakat dapat menjualnya ke masyarakat sekitar hingga rumah makan sekaligus menambah penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Dasan Borok Angga Sarimah yaitu :

“Untuk sumber dananya, dana UMKM didapat dari pusat, dan sekarang bisa memprogramkan “Bule Baper (budi daya lele bawah prinisan), bahwa potensi air yang sedikit pun bisa berkembang, ini sangat membantu masyarakat di desa dan kita sudah pernah panen juga” (wawancara tanggal 25 Maret 2022).

Pemberian Bibit Tanaman

Meskipun di tengah wabah pandemi ini kegiatan pertanian tetap berjalan, dapat dilihat di Desa Dasan borok ini memiliki potensi tanah yang sangat subur. Pemerintah memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan bantuan kepada semua masyarakatnya termasuk eks pekerja migran agar setiap harinya selalu produktif dengan merawat tanaman yang bisa dikonsumsi dan dijual. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Desa Muhammad Kencana yaitu :

“kami memberikan bibit kepada masyarakat dan mereka sangat senang, karena sebagian besar dari masyarakat disini menjual hasil sayuran di pasar, selain bisa dijual terkadang mereka melakukan barter juga” (wawancara tanggal 17 Maret 2022)

Modal Sosial Pekerja Migran dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Pasca Pandemi

Kondisi sosial-ekonomi para pekerja migran akibat di PHK dan dipulangkan cukup memprihatinkan karena berdampak langsung pada pendapatan mereka yang merupakan pemasukan utama dalam kehidupan ekonomi para pekerja migran. Kondisi ini memaksa para pekerja migran untuk mencari alternatif pekerjaan lain untuk menutupi biaya hidup selama pandemi covid-19. Berbagai strategi dilakukan oleh pekerja migran untuk mengatasi hal tersebut. Strategi ini muncul karena para pekerja migran memiliki modal sosial yang cukup untuk memulai usaha dan pekerjaan yang akan mereka lakukan.

Berdasarkan pandangan Pierre Bourdieu modal sosial merupakan jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (Field, 2011). Modal sosial ini menjadi salah satu kemampuan yang dimiliki oleh pekerja migran untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi pada mereka. Modal sosial ini terbentuk pada para pekerja migran dengan lingkungan sekitarnya seperti, pemasok modal, pemerintah dan para pekerja lainnya. Modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat dalam bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini pengembangan sosial-ekonomi pekerja migran pada saat pandemi covid-19. Kerjasama bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Kerjasama yang terjadi dibangun berdasar atas kepercayaan yang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang kuat. Modal sosial adalah sumber-sumber daya yang berkembang pada seseorang individu atau sekelompok individu seperti kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan sosial yang memungkinkan terjalannya kerja sama di antara mereka. Dalam kasus pengembangan sosial-ekonomi buruh migran terdapat 3 unsur modal sosial yang terbentuk sehingga para buruh migran mampu melaksanakan strategi untuk keluar dalam krisis ekonomi buruh

migran di masa pandemi. 3 Unsur tersebut antara lain, Kepercayaan (Trust), Jaringan, dan norma sosial.

Kepercayaan menurut Fukuyama (2002) yaitu norma-norma kooperatif contohnya seperti kejujuran dan kesediaan untuk bisa menolong yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dari masyarakat atau dengan masyarakat lainnya yang sama. Jika para anggota kelompok itu mengharapakan bahwa anggota-anggotanya yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ini muncul para pekerja migran karena adanya hubungan saling membutuhkan sesama para pekerja migran sehingga mereka membentuk kelompok untuk mengelola tanah yang mereka sudah beli dari hasil bekerja di luar negeri untuk dikelola secara bersama dengan konsep bagi hasil. Selain itu juga mereka bekerja sama dengan pekerja migran yang lain dengan pembagian kerja yang jelas, seperti ada yang pergi berdagang ke pasar, ada yang bertani, dan lain sebagainya. Kerja sama yang dilakukan memunculkan kepercayaan satu sama lain sehingga permasalahan sosial-ekonomi pekerja migran dapat diatasi dengan cukup baik.

Robert M.Z. Lawang, mendefinisikan jaringan sebagai terjemahan dari network yang berasal dari dua suku kata yaitu net dan work. Net yaitu jaring, yakni tenunan seperti jala, yang terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. Work berarti kerja. Jadi network yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai kerja dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring. Dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi, para pekerja migran juga membutuhkan jaringan yang kuat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Jaringan yang paling kuat untuk memberikan solusi atas permasalahan buruh migran yang terjadi dilapangan adalah pemerintah daerah. Berbagai bantuan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antara modal yang dimiliki para pekerja migran dengan skill yang dimiliki. Dalam konteks ini pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebagai bentuk ketahanan pangan para pekerja migran untuk mampu bertahan di masa pandemi covid-19. Selanjutnya pemerintah juga memberikan pelatihan UMKM untuk meningkatkan skill para pekerja migran, pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh pekerja migran mengingat mereka adalah mantan pekerja yang bekerja di negara orang tanpa bekal skill entrepreneur. Selain itu, pemerintah memberikan bibit lele untuk pengembangan ekonomi. Jaringan yang baik antara pekerja migran dengan pemerintah menjadi salah satu modal sosial yang dimiliki oleh pekerja migran untuk bisa bertahan dalam masa pandemi Covid-19.

Norma menurut Soerjono Soekanto merupakan kesepakatan bersama yang berperan untuk mengontrol dan menjaga hubungan antara individu dengan 19 individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma masyarakat merupakan patokan untuk bersikap dan berperilaku secara pantas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Norma dapat menjaga hubungan dan meningkatkan kualitas solidaritas sosial antara pemerintah dan para pekerja migran. Norma sosial juga dapat memberikan batasan-batasan sehingga para pekerja buruh tidak melakukan tindakan menyimpang dari kesepakatan yang dilakukan. Norma ini muncul antara pemerintah dengan para pekerja migran pada masa pandemi covid-19 dengan menyarankan para pekerja melaksanakan pembibitan lele, pengembangan kemampuan UMKM, dan Bantuan Langsung Tunai yang sesuai arahan pemerintah agar hasilnya sesuai dengan harapan. Sehingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat khususnya pada para pekerja migra dapat cepat pulih dari krisis pandemi covid-19

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia yang meluas pada kelompok-kelompok yang sangat rentan. Salah satu

kelompok rentan yang terkena dampak pandemi global Covid-19 adalah pekerja migran Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dampak Covid-19 terhadap perkembangan sosial-ekonomi buruh migran di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja, pemulangan ke daerah asal, dan pemotongan gaji atau upah yang dapat menyebabkan pekerja migran berada pada lingkaran kemiskinan. Adapun strategi-strategi pekerja migran Indonesia yang berada di Kecamatan Suralaga untuk dapat keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memanfaatkan sektor peternakan, pertanian dan berjualan di pasar. Sedangkan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi akibat pandemic Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat, pelatihan UMKM, pemberian bibit lele kepada masyarakat dan pemberian bibit tanaman.

Dalam kasus pengembangan sosial-ekonomi buruh migran terdapat 3 unsur modal sosial yang terbentuk sehingga para buruh migran mampu melaksanakan strategi untuk keluar dalam krisis ekonomi buruh migran di masa pandemi. 3 Unsur tersebut antara lain, Kepercayaan (Trust), Jaringan, dan norma sosial. Kepercayaan ini muncul para pekerja migran karena adanya hubungan saling membutuhkan sesama para pekerja migran sehingga mereka membentuk kelompok untuk mengelola tanah yang mereka sudah beli dari hasil bekerja di luar negeri untuk dikelola secara bersama dengan konsep bagi hasil. Jaringan yang paling kuat untuk memberikan solusi atas permasalahan buruh migran yang terjadi dilapangan adalah pemerintah daerah. Berbagai bantuan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antara modal yang dimiliki para pekerja migran dengan skill yang dimiliki. Dalam konteks ini pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebagai bentuk ketahanan pangan para pekerja migran untuk mampu bertahan di masa pandemi covid-19. Norma sosial juga dapat memberikan batasan-batasan sehingga para pekerja buruh tidak melakukan tindakan menyimpang dari kesepakatan yang dilakukan. Norma ini muncul antara pemerintah dengan para pekerja migran pada masa pandemi covid-19 dengan menyarankan para pekerja melaksanakan pembibitan lele, pengembangan kemampuan UMKM, dan Bantuan Langsung Tunai yang sesuai arahan pemerintah agar hasilnya sesuai dengan harapan

REKOMENDASI

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pekerja migran yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga sudah sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki dan juga potensi desa yang ada yang bisa dimanfaatkan. Namun supaya program ini tetap berkelanjutan, maka pemerintah perlu membuat program-program pengembangan dari program yang sudah ada, dan memodifikasi program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk pengembangan ekonomi pekerja migran. Masa transisi dari Covid-19 ke new normal membutuhkan terobosan baru dari pemerintah desa maupun pusat

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Kemendikbud yang telah mendanai penelitian ini dalam skema riset MBKM tahun 2022. Saya ucapkan terimakasih kepada para Tokoh Masyarakat di Suralaga, Pemerintah Desa, Tokoh Pemuda, Pekerja Migran Indonesia di Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, Desa Dasan Borok, Penyalur PMI di Suralaga, Aktivistis Pemerhati PMI/LSM, dan Stakeholders terkait atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, D. D & Amalia, E. (2014). Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 147-159.
- Aswindo, Hanita, M & Simon A. J. (2021). Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 442-452.
- Bangun, Wilson. (2017). *Manajemen SDM Hubungan Industrial*. Erlangga: Jakarta.
- Choudhari, R. (2020). COVID 19 pandemic: Mental health challenges of internal migrant workers of India. *Asian journal of psychiatry*, 54, 102254.
- Dewi, Meutia Karunia. (2021). "Penanggulangan Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi Covid-19 Masyarakat Migran Cihonje Melalui Penyaluran Bantuan Fisik Dan Non-Fisik."
- Disnaker. (2022). "Kadisnakertrans NTB Lepas Keberangkatan 80 Orang Untuk Pemagangan Ke Jepang" diakses tanggal 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3O4xjiN>
- Ekström, M. (1992). Causal explanation of social action: the contribution of Max Weber and of critical realism to a generative view of causal explanation in social science. *Acta Sociologica*, 35(2), 107-122.
- Hajar, S. (2021). Problematika dan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Perempuan dan pada Masa Pandemi COVID-19. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(06), 134-145.
- Hamdi, S. (2022). Covid-19, social stigma and changing religious practice in Tablighi Jamaat communities in Lombok, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76, 102996.
- (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22-24.
- Harjana, N. P. A., Januraga, P. P., Indrayathi, P. A., Gesesew, H. A., & Ward, P. R. (2021). Prevalence of depression, anxiety, and stress among repatriated Indonesian migrant workers during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health*, 9, 630295.
- Harian Republika Edisi Sunday. (2020). "Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Maret 2020. Diakses tanggal 6 April 2022.
- Larsen, J. J. (2020). Migration and people trafficking in southeast Asia. *Trends & issues in Crime and Criminal Justice*. 401.
- Liem, A., Wang, C., Dong, C., Lam, A. I. F., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2021). Knowledge and awareness of COVID-19 among Indonesian migrant workers in the Greater China Region. *Public Health*, 197, 28-35.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nia, B & Sari, R.A.P. (2017). Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Inta* Vol 1 (No 1) 120-144
- Probosambodo & Widiastuti. (2022). Immigration Services for Indonesian Migrant Workers During the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Community Service*, 2 (1), 125-129.
- Rahmawati & Kamilah. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2 (2), 238-273.
- Ritzer, G dan Gouglas J. G. (2011). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Group
- Salmah. (2015). *Strategi Penguatan Profesionalisme Buruh Migran Internasional asal NTB ke Hongkong*. Jakarta: percetakan jalasutra
- Sina. (2020). Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19, *Journal of Management (SME's)*, 12 (2), 239- 254.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahrial, S. (2020). “Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia”. *Jurnal Ners*, 4(2), 21-29.
- Syarifulloh, F. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Bogor: Diperbanyak oleh Ghalia Indonesia.
- Verma, A. K., & Prakash, S. (2020). Impact of covid-19 on environment and society. *Journal of Global Biosciences*, 9(5), 7352-7363.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 59-70.
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3).
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116.
- Word Bank. (2017). “World Bank Annual Report” diakses tanggal 10 Maret 2022. <https://bit.ly/3Ef6TpK>